

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia yang berbeda jenis kelaminnya terdiri dari perempuan dan laki-laki yang mampu secara alamiah memiliki daya tarik-menarik antar satu dengan yang lainnya, agar bisa hidup bersama sebagai pasangan suami dan isteri, atau untuk membentuk ikatan lahir dan bathin dengan tujuan menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, kekal, sejahtera, dan abadi selamanya.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan Perkawinan sebagai "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".²

Tidak selamanya suatu rumah tangga yang direncanakan oleh kedua mempelai selalu bahagia dan berjalan mulus setelah melangsungkan perkawinan. Adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus karena perceraian.³ Sebagaimana disebut bahwa perceraian ada karena perkawinan; tidak ada perkawinan pasti tidak ada perceraian. Perkawinan merupakan awal mula kehidupan bersama sebagai suami dan isteri.

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan*, Jakarta: BINA AKSARA, hal. 1.

² Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: Jalasutra, hal. 1.

³ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 23.

Sedangkan perceraian merupakan akhir kehidupan bersama sebagai suami dan isteri.⁴ Masalah perceraian banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena kenyataannya yang ada di lingkungan masyarakat, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian dan masyarakat memandang perceraian terjadi dengan cara yang mudah.⁵

Perceraian tidak dianjurkan oleh semua agama, pada kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat banyak dijumpai kasus perceraian dan persoalan setelah perceraian yang sering terjadi adalah kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan layak.⁶ Padahal tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban ayah dan ibunya si anak, baik ayah dan ibunya masih hidup rukun bersama atau perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat bahwa *(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal*

⁴ Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 27.

⁵ K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 36.

⁶ Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian", *Wacana Hukum*, Vol IX (2 Oktober 2011), hal. 52.

⁷ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 197.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak menjadi permasalahan besar sebelum maupun sesudah perceraian. Bahkan hak asuh anak sering diperebutkan oleh mantan suami maupun mantan isteri. Namun, pada kenyataannya salah satu pihak diantara mereka yang mendapatkan hak untuk mengasuh anak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan pihak lain yang tidak mendapatkan hak asuh anak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua.

Kasus lain terjadi setelah adanya putusan Hakim Pengadilan Agama, pihak yang sudah mendapatkan putusan hak asuh anak, tidak mematuhi dan menjalankan dengan baik sebagai layaknya orangtua. Hal ini menyebabkan hak-hak anak menjadi terabaikan.⁸

Berdasarkan uraian diatas untuk dapat mengetahui lebih lanjut, maka penulis membuat penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ATAS HAK NAFKAH”.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah suatu hal yang penting agar lebih secara spesifik mengarahkan pada pokok permasalahan, serta kajian penelitian yang dilakukan lebih fokus pada sasaran, untuk menghindari

⁸ *Ibid*, hal 45-46.

penyimpangan dan perluasan masalah sehingga pokok masalah tersebut dengan mudah untuk dipahami. Penulis akan lebih berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Hak Nafkah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana hak nafkah anak akibat perceraian orangtuanya?
- b. Bagaimana upaya pemenuhan hak nafkah anak yang dilindungi oleh hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui lebih rinci hak nafkah anak akibat perceraian orangtuanya.
- b. Mengetahui upaya pemenuhan hak nafkah anak yang dilindungi oleh hukum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan dalam berfikir mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian atas hak nafkah
- b. Manfaat praktis yaitu adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi masyarakat

terkait perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian atas hak nafkah.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, *Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain dari tujuan dari perkawinan yaitu pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua (Soebekti, Intermasa, 2003: 7).⁹

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, *Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan*.¹⁰ Adapun Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

⁹ *Ibid*, hal. 45-46.

¹⁰ Djamil Latif, *Op Cit*, hal. 106.

- a. Bapak dan ibunya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata karena kepentingan si anak. Apabila terdapat perselisihan terkait hak asuh anak, maka pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan menentukan kepada bekas suami untuk wajib memberikan biaya penghidupan kepada bekas isterinya.¹¹

“Perceraian yang terjadi tanpa diikuti adanya kepastian hukum tentang hak nafkah anak dan hak asuh anak, sangat berpotensi menghilangkan hak-hak anak. Kepastian hukum yang berbentuk sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka dapat dieksekusi. Apabila hanya ada kesepakatan antar kedua pihak, maka akan rawan terjadi pengabaian atau penelantaran hak-hak anak”.¹²

¹¹ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hal. 223.

¹² Anjar S. C. Nugraheni, dkk, “*Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*”, *Yustisia*, Vol. 2 No. 3 (September-Desember 2013), hal. 62.

E. Metode Penelitian

“Penelitian hukum yakni bentuk proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi”.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian atas hak nafkah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif. Penulis akan menggambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian atas hak nafkah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

“Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan yang berupa keterangan, informasi,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 35.

serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian”.¹⁴ Penulis dalam memperoleh sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara atau mengambil keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁵

1) Bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2) Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal, buku, dan dokumen lain terkait objek penelitian ini.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 30.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 106.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh oleh penulis melalui penelitian kepustakaan ini yang bersumber dari buku-buku, publikasi, dokumen resmi, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data primer.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dan dihubungkan dengan literatur-literatur atau teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk mempermudah dan memahami gambaran secara menyeluruh dalam pembahasan. Maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid*, hal 107.

BAB I berisi pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan tentang Perkawinan, Tinjauan Tentang Perceraian, Tinjauan tentang Anak, dan Tinjauan tentang Pemeliharaan dan Nafkah Anak Akibat Perceraian.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan dari objek penelitian mengenai hak nafkah anak dan upaya pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian kedua orang tuanya.

BAB IV berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran dari akhir penelitian